

EVALUASI PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

Dafia Salsabila

NPP. 32.0184

Asdaf Kota Jambi, Provinsi Jambi

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: dafiabilaa@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Agus Supriadi Harahap, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research is motivated by the high number of drug abuse cases in Jambi City, which is partly attributed to the lack of public understanding regarding the dangers of drug use. **Purpose:** This study aims to evaluate the effectiveness of drug abuse prevention efforts implemented by the National Unity and Political Agency (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) of Jambi City. **Method:** The research adopts a qualitative approach using a descriptive method. Data collection techniques included documentation and interviews with personnel from the National Unity and Political Agency and other relevant parties. The data were analyzed using an interactive analysis model, consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Result:** The findings reveal that the drug abuse prevention efforts conducted by the National Unity and Political Agency of Jambi City have been implemented in line with existing policies. Nevertheless, the implementation faces several challenges, including limited funding and difficulties in coordination among institutions. **Conclusion:** The implementation of the drug abuse prevention program by the National Unity and Political Agency (Kesbangpol) of Jambi City has been aligned with regional conditions and objectives, and has contributed to raising public awareness about the dangers of drug abuse. However, to achieve a broader and more sustainable impact, it is necessary to strengthen aspects such as target group engagement, funding, and the adoption of adaptive strategies that respond to the evolving needs of the community.

Keywords: Evaluation; Drug Abuse; Prevention

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini didasari oleh tingginya angka kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara dengan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, namun masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran dan tantangan dalam koordinasi antar instansi. **Kesimpulan:** Pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi telah memiliki arah dan tujuan yang relevan dengan kondisi daerah, serta telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Akan tetapi, agar program ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, perlu dilakukan penguatan pada aspek pelibatan sasaran, pendanaan, dan strategi pelaksanaan yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi, Penyalahgunaan Narkoba, Pencegahan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menempati peringkat kedua negara paling rawan bencana di dunia, dengan skor 43,5 dari 100, menurut Frege et al. (2023) pada *World Risk Index*. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang berada di cincin api Pasifik (*Ring of Fire*), termasuk dalam kawasan yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, baik alam, non-alam, maupun sosial (Wardyaningrum, 2014). Di antara berbagai isu yang ada, salah satu yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan zat dan kecanduan memiliki dampak serius terhadap sistem sosial yang ada, memengaruhi tingkat kejahatan, rawat inap di rumah sakit, kekerasan terhadap anak, dan penelantaran anak, serta dengan cepat menghabiskan dana publik yang terbatas. (Hoffman, 1990). Ciri-ciri penyalahguna narkoba dalam perubahan perilaku seperti prestasi di sekolah/ di tempat kerja turun tiba-tiba secara signifikan, membolos, tidak menyelesaikan tugas, berubahnya pola tidur, sering begadang, sulit untuk bangun pagi hari dan berkurangnya selera makan (Elisabet et al., 2022).

Kewajiban pemerintah dalam menyediakan keamanan dan keselamatan bagi warganya merupakan salah satu implikasi dari adanya fungsi perlindungan masyarakat (Sutiyo dan Eviany, 2023). Kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi telah menjadi masalah yang sangat serius. Narkoba merupakan salah satu bencana sosial yang harus dilakukan dalam penanggulangannya. Penanggulangan bencana adalah sebuah proses sistematis dengan menggunakan keputusan administratif, organisasi, keterampilan operasional, kapasitas implementasi, strategi, dan kapasitas dari masyarakat dalam mengurangi dampak dari ancaman alam, lingkungan, maupun bencana teknologi (Mujahidin, S.Sos., 2022). Dilansir dari detiksumbagsel, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi telah memetakan indeks kerawanan peredaran narkoba selama tahun 2023. Kota Jambi ditetapkan sebagai daerah dengan tingkat kerawanan narkoba tertinggi di Provinsi Jambi.

Upaya mengatasi banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kota Jambi, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan harus di efektifkan lagi dalam pelaksanaan program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Empat tahun terakhir, frekuensi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kota Jambi masih cukup tinggi. Kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi pengguna, lingkungan dan negara sekalipun. Dengan demikian seharusnya hal tersebut menjadi evaluasi bagi pemerintah dan semua masyarakat untuk lebih memperhatikan dan menjaga lingkungan guna mengantisipasi menyebarkan peredaran narkoba. Kasus yang semakin tinggi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dijalankan belum sepenuhnya efektif.

Berbagai studi internasional mendukung pentingnya pelaksanaan dan evaluasi program pencegahan berbasis bukti. Botvin dan Griffin (2000) menekankan efektivitas pendekatan Life Skills Training (LST) dalam mengurangi penggunaan zat hingga 50% di kalangan pelajar. Sementara itu, Spoth et al. (2011) menunjukkan bahwa program berbasis keluarga dan komunitas memiliki dampak jangka panjang dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba. Program pencegahan yang melibatkan masyarakat secara aktif dan dilakukan secara konsisten terbukti lebih berhasil dibanding pendekatan yang bersifat sporadis (Sanchez et al., 2011). Oleh karena itu, peneliti bertujuan meneliti evaluasi pelaksanaan pencegahan secara intensif untuk mengetahui evaluasi dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba telah efektif serta dampak pelaksanaan tersebut terhadap masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi perhatian nasional dan global, serta berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan untuk menanggulangnya, namun efektivitas implementasi program pencegahan di tingkat daerah masih jarang mendapatkan sorotan yang memadai. Sejauh ini, sebagian besar penelitian di Indonesia lebih banyak memfokuskan perhatian pada peran Badan Narkotika Nasional (BNN), lembaga rehabilitasi, dan institusi pendidikan dalam upaya pencegahan maupun penanganan narkoba.

Penelitian mengenai peran dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba, terutama di daerah seperti Kota Jambi, masih sangat minim ditemukan dalam literatur ilmiah. Padahal, sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dalam menjaga ketahanan nasional, Kesbangpol memiliki kewenangan strategis dalam membangun ketahanan masyarakat, menyelenggarakan pendidikan politik, serta melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, termasuk bahaya penyalahgunaan narkoba.

Ketiadaan studi evaluatif yang mengulas secara mendalam bagaimana pelaksanaan program pencegahan narkoba dijalankan oleh Kesbangpol Kota Jambi menunjukkan adanya gap penelitian yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan evaluasi pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Kesbangpol Kota Jambi Provinsi Jambi secara sistematis dan terukur menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn sebagai kerangka teoritis utama.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penelitian oleh Tasyaunnadawa (2023) berjudul Kinerja Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Narkotika di Provinsi Jambi, menemukan bahwa BNN melakukan berbagai upaya seperti operasi tangan, razia, dan kampanye sosialisasi dalam memberantas peredaran narkoba. Penelitian Sri Wahyuni (2019) menemukan kolaborasi pemerintah dalam melaksanakan tindakan-tindakan kolaborasi dengan memberikan ruang gerak kepada pihak lain dalam bersosialisasi penanggulangan narkoba dan memajukan proses kolaborasi dengan melakukan pertemuan dengan pihak lain tentang upaya yang dilakukan serta melakukan komunikasi dan menjaga kepercayaan dengan mitra lain serta prosedur dan kesepakatan bersama mengacu kepada undang undang. Penelitian Nining memberikan pengenalan, pemahaman, dan kesadaran hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Yayasan Panti Asuhan Cikarang Yatim yang berupaya mengendalikan pola kenakalan anak sebagai upaya preventif untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba pada

anak. Penelitian Sherina yaitu melaksanakan pencegahan narkoba dengan kegiatan edukatif yaitu seminar dari badan kesehatan ataupun kantor polisi sekitar, dan dakwah pada setiap khutbah jum'at. Berdasarkan hasil penelitian tentang efektifitas P4GN di kalangan mahasiswa, penulis menemukan yaitu pemerintah setempat mendukung penuh proses P4GN, meskipun masih adanya masyarakat yang tidak peduli dengan adanya penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkoba di wilayahnya (Nurlatifah et al., 2022).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain itu pendekatan yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendekatan evaluasi William N. Dunn (2003), dimana pendekatan ini tidak hanya melihat apakah program pencegahan narkoba dijalankan atau tidak, tetapi juga menilai sejauh mana program tersebut memberikan hasil yang optimal, efisien dalam penggunaan sumber daya, menjangkau kelompok sasaran secara adil, serta mampu merespons kebutuhan dan permasalahan aktual masyarakat. Pendekatan ini dinilai sangat relevan dalam konteks penelitian kebijakan publik di tingkat daerah, di mana dinamika sosial, politik, dan kelembagaan lokal sangat memengaruhi hasil implementasi program.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, penelitian ini ingin mengidentifikasi program yang dilakukan dengan 6 indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

II. METODE

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif sebab metode ini menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan saat melakukan penelitian. Menurut Sugiyono (2019:8) "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berpedoman pada filsafat postpositivisme yang digunakan dalam meneliti kondisi objek alamiah". Penulis juga menggunakan analisis deskriptif. Menurut Mely G. Tan dalam Ulber Silalahi (2009:28) metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang karakteristik individu, situasi, fenomena, atau kelompok tertentu, atau untuk menemukan sejauh mana hubungan antara fenomena yang berbeda dalam masyarakat.

Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara dan dokumentasi, data dikumpulkan melalui wawancara dengan unsur pemerintah dan unsur masyarakat agar mendapatkan data secara aktual dari lapangan dan dokumentasi resmi yang relevan dengan topik penelitian. Adapun analisis data oleh Miles dan Huberman dalam Simangunsong (2017) teknik analisis data interaktif yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan untuk memilah dan memfokuskan data yang relevan, penyajian data dilakukan dengan mengorganisir dan menyusun data secara sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan merupakan proses akhir untuk menentukan makna data yang telah disajikan. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, Provinsi Jambi, dan mengikuti jadwal penelitian yang telah direncanakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi menggunakan teori evaluasi William N. Dunn (2003) menggunakan 6 (enam) indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan atau program. Kesesuaian antara hasil pelaksanaan pencegahan dengan visi dan misi Kesbangpol diukur untuk menentukan keberhasilan program ini. Visi dan misi Kesbangpol sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Jambi yaitu menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa yang bersih, aman, harmonis, religius, inovatif, serta sejahtera. Pencegahan penyalahgunaan narkoba bertujuan dalam upaya strategis yang sangat penting dalam menjaga kualitas sumber daya manusia dan menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat dan produktif. Tujuan ini selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah yang mengedepankan kesejahteraan, keamanan, dan keharmonisan masyarakat. Upaya yang dilakukan yaitu mencakup sosialisasi tentang bahaya narkoba, koordinasi dengan berbagai pihak, serta pengawasan internal melalui tes urine bagi pegawai sebagai langkah preventif.

Pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba di kalangan pelajar SMP sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini biasanya dilakukan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi dan menyasar sekolah-sekolah yang dianggap rawan peredaran narkoba, terutama yang berada di pinggiran kota. Selanjutnya, pembentukan Satgas Anti Narkoba juga menjadi salah satu upaya untuk memastikan keterpaduan dan keberhasilan pelaksanaan pencegahan narkoba. Rapat koordinasi ini melibatkan instansi pemerintah, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta stakeholder terkait lainnya untuk menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pencegahan narkoba. Selain itu, kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba meliputi pelaksanaan tes urine. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi melaksanakan pemeriksaan tes urine sebagai salah satu upaya strategis dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja pemerintahan dan instansi terkait.

Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan oleh Badan Kesbangpol Kota Jambi selaras dengan visi menciptakan lingkungan yang bersih dan aman. Pelaksanaan yang dijalankan cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran kelompok sasaran, namun masih terbatas dalam cakupan dan metode sosialisasi.

3.2 Efisiensi

Efisiensi yaitu mengukur hubungan antara hasil yang dicapai dengan usaha atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil tersebut. Dimensi ini menilai kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi mampu menghasilkan output maksimal dengan penggunaan biaya, tenaga, dan waktu yang seminimal mungkin.

Kesbangpol tidak bekerja sendiri dalam menjalankan program pencegahan narkoba. Ia membangun kemitraan strategis dengan BNN Kota Jambi, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Dinas Pendidikan, serta OPD lain yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan pembagian tugas dan pemanfaatan sumber daya secara bersama, sehingga tidak perlu menggandakan anggaran untuk pelatihan, sosialisasi, maupun pelaksanaan tes urine. Ini menekan biaya operasional sekaligus memperluas jangkauan program. Pendekatan ini sangat penting mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah, sehingga pengelolaan yang efisien

menjadi kunci utama dalam mencapai hasil yang maksimal. Kesbangpol memiliki peran sebagai fasilitator dan koordinator, sehingga dapat menghindari duplikasi kegiatan dan pemborosan anggaran.

Selain itu, pemanfaatan fasilitas dan agenda pemerintah yang telah ada merupakan salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jambi dalam pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Alih-alih menyelenggarakan kegiatan secara terpisah yang memerlukan anggaran khusus, Kesbangpol mengintegrasikan program pencegahan narkoba ke dalam kegiatan rutin pemerintahan yang sudah terjadwal, seperti apel pagi, rapat koordinasi antar-OPD, serta pelatihan dan bimtek pegawai. Selain itu, sarana prasarana milik pemerintah, seperti ruang pertemuan OPD, kantor kecamatan, dan aula instansi, dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi tanpa harus menambah beban biaya penyewaan tempat.

Pelaksanaan pencegahan narkoba yang dijalankan oleh Kesbangpol Kota Jambi telah berusaha menggunakan sumber daya secara optimal melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Namun, stagnasi jumlah kasus menunjukkan bahwa meskipun sumber daya telah dimanfaatkan dengan baik, dampak pelaksanaan pencegahan terhadap penurunan kasus masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi baru untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan tanpa harus meningkatkan biaya secara signifikan, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital dan memperkuat sinergi dengan instansi terkait.

3.3 Kecukupan

Dimensi kecukupan mengacu pada sejauh mana pencapaian hasil suatu kebijakan sudah memadai untuk memecahkan masalah yang menjadi fokus kebijakan tersebut. Hal ini mencakup penilaian terhadap sejauh mana program pencegahan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka penyalahgunaan narkoba serta memenuhi kebutuhan kelompok sasaran.

Dalam konteks ini, capaian program OPD Bersinar di Kota Jambi menunjukkan adanya langkah-langkah positif dan terukur, tetapi belum sepenuhnya memenuhi aspek kecukupan. Kegiatan yang dilaksanakan masih terkonsentrasi pada tingkat kota. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan program belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok sasaran secara adil dan menyeluruh. Faktor utama yang menghambat pencapaian kecukupan dalam program OPD Bersinar di Kota Jambi adalah keterbatasan anggaran. Ketidakpastian dalam alokasi dana tahunan menyebabkan kegiatan tidak dapat dijalankan secara terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini memaksa Kesbangpol untuk memfokuskan kegiatan hanya pada bentuk-bentuk yang bersifat administratif seperti rapat koordinasi atau sosialisasi, yang berdampak pada terbatasnya jangkauan dan efektivitas intervensi. Kondisi ini juga menyebabkan program belum mampu menyentuh akar masalah secara komprehensif, baik dari sisi pencegahan, rehabilitasi, maupun pemberdayaan.

Badan Kesbangpol dalam hal ini masih tergolong belum memadai. Meskipun telah menunjukkan komitmen awal dan langkah-langkah pelaksanaan yang penting, program ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan narkoba secara menyeluruh. Cakupan sasaran yang terbatas, kurangnya kontinuitas program, serta hambatan anggaran menjadi faktor utama yang memengaruhi rendahnya tingkat kecukupan. Oleh karena itu, penguatan dukungan lintas sektor, perencanaan anggaran yang berkelanjutan, serta perluasan cakupan sasaran menjadi hal yang mendesak untuk memastikan bahwa program ini dapat berfungsi secara lebih efektif dan memadai dalam jangka panjang.

3.4 Perataan

Perataan yaitu menilai seberapa adil nya pelaksanaan pencegahan dalam mendistribusikan manfaat dan beban di antara berbagai kelompok masyarakat. Evaluasi

pemerataan ini penting agar tidak terjadi diskriminasi atau ketimpangan dalam realisasi pelaksanaan pencegahan, sehingga seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk merasakan manfaatnya.

Kesbangpol telah melakukan sejumlah kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, dan tes urine bagi ASN di lingkungan pemerintah. Namun, jika dilihat dari aspek pemerataan, distribusi program tersebut belum sepenuhnya menyentuh seluruh segmen ASN maupun wilayah administratif Kota Jambi secara setara. Salah satu contoh yang mencerminkan ketimpangan distribusi manfaat program adalah terbatasnya pelaksanaan kegiatan di lingkungan OPD tingkat kota, sedangkan ASN yang lainnya masih minim mendapat akses terhadap kegiatan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program cenderung lebih terfokus pada pusat pemerintahan atau instansi besar, sehingga belum menyentuh seluruh lapisan birokrasi secara merata. Pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi telah menunjukkan adanya komitmen institusional melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan tes urine yang menyasar kalangan ASN dan pelajar. Namun, dari hasil evaluasi berdasarkan dimensi pemerataan, diketahui bahwa program tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok sasaran secara adil dan merata.

Kegiatan lebih terfokus pada OPD tingkat kota dan sejumlah SMP yang dianggap rawan, sementara pegawai di wilayah administratif yang lebih kecil serta kelompok masyarakat umum masih belum mendapatkan akses yang setara terhadap program. Faktor utama yang membatasi keberhasilan program ini adalah keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD dan harus dibagi dengan program lain di bawah naungan Kesbangpol. Dampaknya, kegiatan tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh, sehingga upaya pencegahan belum mampu membentuk ketahanan kolektif terhadap bahaya narkoba. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan alokasi anggaran, perencanaan yang lebih inklusif, serta koordinasi lintas sektor agar program pencegahan dapat berjalan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.

3.5 Responsivitas

Responsivitas disini mengukur sejauh mana respons masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan. Evaluasi responsivitas penting agar pelaksanaan kegiatan tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat yang menjadi targetnya. Sebagian besar dari hasil wawancara menyatakan bahwa pelaksanaan pencegahan yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Jambi memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba. Salah satu dampak utama yang dirasakan adalah meningkatnya pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, terhadap risiko penyalahgunaan narkoba.

Masyarakat menunjukkan respons yang baik dengan turut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan, seperti sosialisasi dan tes urine. Partisipasi aktif ini berkontribusi pada peningkatan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, terkait bahaya narkoba, sehingga diharapkan mampu menurunkan angka penyalahgunaan di masa mendatang. Selain itu, pelaksanaan tes urine tidak hanya menjadi upaya deteksi dini, tetapi juga mendorong pegawai untuk lebih sadar akan konsekuensi penggunaan narkoba, baik dari sisi kesehatan maupun karir. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dan pelaksanaan program yang terarah menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi.

Secara keseluruhan, program pencegahan narkoba oleh Kesbangpol Kota Jambi telah meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan pelajar SMP dan pegawai pemerintahan kota. Sosialisasi dan tes urine dinilai efektif dalam menanamkan pemahaman akan bahaya narkoba bagi kelompok sasaran utama. Namun, dari segi responsivitas, program

ini masih memiliki keterbatasan karena hanya mencakup pelajar SMP, sementara kewenangan untuk SMA berada di ranah pemerintah provinsi.

3.6 Ketepatan

Dimensi ketepatan ini mengacu pada tujuan yang direncanakan dalam suatu program harus benar-benar berguna atau bernilai bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Kesbangpol Kota Jambi, dimensi ini dapat dianalisis dari harapan dan rencana yang disampaikan oleh para informan dalam wawancara.

Sebagian besar informan menilai, bahwa tujuan dari pelaksanaan pencegahan narkoba yang dijalankan oleh Kesbangpol Kota Jambi sudah relevan dengan kebutuhan masyarakat. Harapan utama yang disampaikan adalah peningkatan anggaran agar program dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau lebih banyak sasaran. Peningkatan anggaran sangat diperlukan dalam mengoptimalkan seluruh kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dengan alokasi anggaran yang memadai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi dapat memperluas cakupan kegiatan, meningkatkan frekuensi sosialisasi, serta mengembangkan metode edukasi yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Harapan tersebut menunjukkan bahwa tujuan program pencegahan narkoba yang direncanakan harus benar-benar berguna dan bernilai bagi kelompok sasaran. Wawancara ini menegaskan pentingnya penyesuaian tujuan dan strategi pelaksanaan program pencegahan narkoba oleh Kesbangpol Kota Jambi agar benar-benar sesuai dengan prinsip ketepatan, yakni tujuan yang direncanakan berguna, bernilai, dan relevan bagi seluruh masyarakat.

Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi telah memperhatikan prinsip bahwa tujuan program harus benar-benar berguna dan bernilai bagi pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Harapan dari unsur masyarakat agar kegiatan pencegahan dilakukan lebih sering dan menjangkau masyarakat umum, bukan hanya pegawai atau pelajar, semakin menegaskan bahwa tujuan program harus benar-benar bermanfaat dan dirasakan secara luas. Dengan demikian, seluruh harapan dan rencana tersebut menunjukkan bahwa Kesbangpol Kota Jambi telah merumuskan tujuan.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba lebih terkonsentrasi pada aspek promotif dan preventif, khususnya melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat umum, pelajar, serta organisasi kemasyarakatan. Kesbangpol secara aktif menginisiasi penyuluhan, pembinaan, dan kampanye bahaya narkoba dengan melibatkan berbagai pihak seperti LSM dan ormas dalam rangka membangun jejaring informasi di tingkat masyarakat. Strategi ini selaras dengan temuan dari penelitian oleh Nining Yurista (2021) mengenai "Pengenalan Bahaya Narkoba sebagai Bentuk Pencegahan Dini di Panti Yatim Cikarang", yang menekankan pentingnya edukasi sejak dini sebagai fondasi utama dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba. Demikian pula, studi oleh Orlindriani (2019) tentang "Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba di Desa Kuta Baro Jeuram" menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat lokal melalui edukasi langsung terbukti mampu meningkatkan kesadaran kolektif terhadap bahaya narkoba di lingkungan pedesaan.

Namun, berbeda dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki wewenang dan kapasitas lebih luas, termasuk dalam penanganan rehabilitatif terhadap korban

penyalahgunaan narkoba, peran Kesbangpol masih belum mencakup aspek kuratif. Hal ini berbanding lurus dengan hasil penelitian berjudul "Kinerja Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Narkotika di Provinsi Jambi", yang menunjukkan bahwa BNN memiliki mandat struktural dan sumber daya untuk melakukan tindakan pencegahan hingga penindakan serta rehabilitasi, sehingga menjadikan perannya lebih komprehensif dibanding Kesbangpol. Perbedaan peran ini juga diperkuat oleh temuan bahwa kewenangan Badan Kesbangpol Kota Jambi terbatas secara administratif hanya pada wilayah Kota Jambi. Hal ini berdampak pada keterbatasan jangkauan program pencegahan, yang belum mampu menjangkau lintas kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.

Situasi tersebut mengindikasikan pentingnya integrasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor, seperti yang ditekankan dalam studi "Kolaborasi Pemerintahan dalam Penanggulangan Narkoba di Kabupaten Bone". Penelitian tersebut menyoroti keberhasilan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, BNN, kepolisian, dan elemen masyarakat dalam menciptakan strategi penanggulangan narkoba yang lebih holistik dan terkoordinasi. Dalam konteks ini, Kesbangpol Kota Jambi perlu meningkatkan perannya tidak hanya sebagai pelaksana program internal, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun jejaring lintas wilayah dan lembaga.

Lebih lanjut, keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Jambi turut membatasi skala dan keberlanjutan program yang dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa peran Kesbangpol sangat dipengaruhi oleh faktor struktural dan sumber daya, sebagaimana juga tercermin dalam studi "Efektivitas Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kalangan Mahasiswa", di mana keberhasilan program P4GN sangat ditentukan oleh dukungan anggaran dan keberlanjutan kegiatan edukatif secara sistematis di lingkungan kampus. Dalam kasus Kesbangpol Kota Jambi, keberhasilan program serupa sangat tergantung pada kemampuan anggaran dan sinergi lintas sektor.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Badan Kesbangpol Kota Jambi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba cukup signifikan pada aspek pencegahan awal, tetapi masih menghadapi tantangan besar dalam hal jangkauan wilayah, dukungan anggaran, dan koordinasi antarlembaga. Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, posisi Kesbangpol berada pada tahap awal dari spektrum penanggulangan narkoba, sementara efektivitas menyeluruh baru dapat dicapai apabila terjadi integrasi kuat dengan lembaga seperti BNN, pemerintah provinsi/kabupaten, serta unsur masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penguatan peran strategis Kesbangpol ke depan membutuhkan kebijakan kolaboratif dan pendekatan lintas sektoral yang menyeluruh untuk mencapai pencegahan narkoba yang efektif dan berkelanjutan di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi melalui inisiatif OPD Bersinar telah menunjukkan langkah konkret dalam membangun lingkungan pemerintahan yang bersih dari narkoba. Kegiatan seperti sosialisasi, tes urine, dan pembentukan Satuan Tugas Anti Narkoba telah dilaksanakan secara sinergis bersama BNN dan instansi terkait, serta berhasil meningkatkan kesadaran di kalangan ASN dan pelajar.

Namun, implementasi program masih menghadapi kendala dalam hal keterbatasan anggaran dan jangkauan yang belum merata. Sasaran program cenderung terfokus pada lingkup administratif kota, sementara pelibatan ASN tingkat kecamatan dan masyarakat umum masih kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, dukungan pendanaan yang lebih konsisten, serta strategi pelaksanaan yang adaptif agar program dapat menjangkau lebih luas dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, program ini relevan dengan kebutuhan

daerah dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan narkoba, meskipun masih membutuhkan penguatan di berbagai aspek untuk mencapai efektivitas yang maksimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya terfokus pada pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Kesbangpol Kota Jambi, sehingga belum mencakup peran instansi lain seperti BNN secara lebih mendalam maupun keterlibatan lintas sektor di tingkat provinsi atau kabupaten. Kedua, data yang diperoleh bersumber dari wawancara dan dokumentasi yang terbatas pada informan tertentu, sehingga perspektif yang dihasilkan mungkin belum sepenuhnya mewakili seluruh pelaku atau kelompok sasaran program. Ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya juga membatasi peneliti dalam menjangkau lebih banyak wilayah atau melakukan evaluasi secara longitudinal terhadap dampak jangka panjang program.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Berdasarkan hasil temuan dan keterbatasan yang ada, arah masa depan penelitian ini dapat difokuskan pada pengembangan kajian yang lebih komprehensif terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak instansi yang memiliki peran strategis, seperti BNN, kepolisian, dinas pendidikan, serta lembaga swadaya masyarakat, guna memperoleh gambaran yang lebih holistik mengenai sinergi pencegahan narkoba. Selain itu, pengumpulan data kuantitatif juga dapat dipertimbangkan untuk mengukur tingkat efektivitas program secara empiris, termasuk dampaknya terhadap perubahan perilaku sasaran program. Kajian lanjutan juga penting diarahkan pada evaluasi jangka panjang terhadap keberlanjutan program, terutama dalam aspek perencanaan anggaran, pelibatan komunitas, serta integrasi kebijakan antarlevel pemerintahan. Dengan demikian, hasil-hasil penelitian di masa mendatang dapat memperkuat rekomendasi kebijakan dan mendukung formulasi strategi pencegahan narkoba yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi, beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Botvin, G. J., & Griffin, K. W. (2000). *Life Skills Training: Empirical findings and future directions*. The Journal of Primary Prevention.
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. Jurnal Multidisiplin Indonesia
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan. Penerbit Nasmedia.
- Frege, I. A., Blicke, V., Bradshaw, S., Dijkzeul, D., Funke, C., Kienzl, P., Kusters, K., Masuch, L., Nasreen, M., Radtke, K., Schneider, S., Thielborger, P., Weller, D., Wieggers, O.,

- Yaman, D. K., & Zennig, K. (2023). *WorldRiskReport* 2023. <https://www.preventionweb.net/quick/80497>
- Hoffman, R. S., & Goldfrank, L. R. (1990). *The impact of drug abuse and addiction on society. Emergency Medicine Clinics of North America*, 8(3), 467–480.
- Mujahidin, S.Sos., M. M. (2022). *Manajemen Risiko Kebencanaan*. Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI).
- Nurlatifah, Ai, Andi Mulyadi, and Dine Meigawati. “Efektifitas Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kalangan Mahasiswa.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022). <https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1331>.
- Orlindriani, Sherina. “Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba Di Desa Kuta Baro Jeuram.” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/8429/>.
- Nining Yurista, Prawitasari. “Pengenalan Bahaya Narkoba Sebagai Bentuk Pencegahan Dini Penggunaan Narkoba Pada Anak Di Panti Yatim Cikarang.” *Jurnal Abdimas* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.37366/jabmas.v2i02.864>.
- Sanchez, V., Steckler, A., Nitirat, P., Hallfors, D., & Cho, H. (2011). *Evaluating prevention programs with the Results Mapping tool*. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.
- Spoth, R., Trudeau, L., Redmond, C., & Shin, C. (2011). *Long-term effects of universal preventive interventions on prescription drug misuse*. Medical Care.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tasyaunnadawa. (2023). *Kinerja Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Narkotika di Provinsi Jambi*.
- Wahyuni, S. (2019). *Kolaborasi Pemerintah Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kabupaten Bone*. 1–87.
- Wardyaningrum, D. (2014). *Perubahan komunikasi masyarakat dalam inovasi mitigasi bencana di wilayah rawan bencana Gunung Merapi*. *Jurnal ASPIKOM*, 2(3), 179-197.